

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

1. Perkembangan Bank di Indonesia

Sejarah perkembangan bank di Indonesia tidak akan terlepas pada saat Indonesia masih mengalami masa penjajahan oleh Hindia Belanda. Kehadiran perbankan pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya VOC yaitu kepanjangan dari *reenigde Oost-Indische Compagnie* yang merupakan kolonial Hindia Belanda yang berada di Indonesia, VOC merupakan perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada tahun 1619. Salah satu kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan pada saat itu adalah nasionalisasi *De Javasche Bank*. De Javasche Bank sebagai bank sentral melalui UU No. 24 Tahun 1951. Yang selanjutnya diikuti perubahan terhadap regulasi perbankan yang terus berkembang dengan ditetapkannya beberapa UU yang mengatur ketentuan dalam bidang Perbankan, UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang kemudian diubah kedalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman pada saat ini telah dibentuk beberapa lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan perbankan seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembaharuan terhadap kegiatan perbankan yang lainnya.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (ojk.go.id)

Di Indonesia sendiri sebagian besar bank umum konvensional masih mengandalkan kredit sebagai pemasukan terbesar utama untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini didorong oleh fungsi utama bank yaitu sebagai perantara untuk masyarakat yang surplus dana dan defisit dana, dan semua dana yang ada di bank itu berasal dari masyarakat sehingga harus disalurkan kembali ke masyarakat yang disebut dengan kredit. Indonesia yang merupakan negara berkembang masih mengandalkan pemasukan dari penyaluran kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan tujuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indoneisa. Sehingga penyaluran kredit masih menjadi aktivitas utama untuk mendapatkan keuntungan.

Pada waktu sekarang persaingan penyaluran kredit sangatlah ketat, sehingga masing-masing bank harus memiliki strategi yang tepat dan kreatif dalam hal menciptakan produk kredit yang sesuai dengan perkembangan

kebutuhan masyarakat agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam bidang perbankan. Namun penyaluran kredit juga memiliki risiko yang sangat besar baik bagi bank itu sendiri bahkan bagi negara Indonesia sehingga penyaluran kredit harus didampingi dengan manajemen risiko yang sangat baik.

Pada saat ini dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran kredit semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peranan kredit menjadi sangat penting karena, dengan adanya kredit seseorang atau badan usaha dapat menjalankan usahanya secara berkeseinambungan dan membantu perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya.

TABEL 4.1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Konvensional Periode Tahun 2015 – Juni 2017

Jaringan Kantor Bank Konvensional			
Indikator	2015	2016	Juni 2017
Jumlah Bank	118	116	115
Jumlah Kantor	32.949	32.730	32.652

Sumber: OJK – Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2017

Jumlah Bank Konvensional dan jumlah kantor dari Tahun 2015 hingga Juni 2017 terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah Bank Konvensional dan jumlah kantor yang cukup drastis terjadi pada Tahun 2015 ke Tahun 2016. Pada Tahun 2015 jumlah bank sebanyak 118 bank dan kemudian menurun menjadi sebanyak 116 bank pada Tahun 2016 yang diikuti dengan penurunan jumlah kantor juga yaitu 32.949 kantor pada Tahun 2015 menjadi 32.730 kantor pada tahun 2016. Penurunan ini terus

terjadi hingga Juni 2017 yang menunjukkan Jumlah Bank menjadi 115 bank dan jumlah kantor menjadi 32.652 kantor.

TABEL 4.2
Perkembangan Aset Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (Miliar Rupiah)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	Juni 2017
Jumlah Aset Bank Konvensional	6.095.908	6.729.799	7.025.811

Sumber: OJK- Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2017

Pada table diatas dapat dilihat bahwa jumlah aset bank konvensional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang sangat drastis terlihat pada Tahun 2015 hingga Tahun 2016 yaitu sebesar 633.891 Miliar, yang semula pada Tahun 2015 sebesar 6.095.908 Miliar pada Tahun 2016 menjadi sebesar 6.729.799 Miliar. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga Juni 2017 yang menunjukkan jumlah aset bank konvensional menjadi sebesar 7.025.811 Miliar.

B. Gambaran Umum Variabel Dependent.

1. Perkembangan *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut (Taswan, 2010) di dalam (Mada, 2015), dalam UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Namun tidak semua penyaluran kredit yang di salurkan ke nasabah tertagih pada tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, hal itu dapat dikatakan sebagai kredit tidak lancar atau kredit macet atau juga dapat dikatakan sebagai kredit yang bermasalah. Dalam menjalankan fungsinya bank umum konvensional tidak akan terlepas dari risiko dalam hal penyaluran kredit karena sumber penerimaan utamanya berasal dari pendapatan bunga atas penyaluran kredit. Risiko yang ditakutkan dalam kegiatan penyaluran kredit adalah tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada pihak bank dalam hal melunasi kredit yang telah diberikan. Dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban ini adalah meningkatkan jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yaitu perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kredit kolektibilitas yang Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan, NPL juga dapat disebut sebagai kredit bermasalah (kredit tidak lancar).

Melalui tingkat NPL para nasabah bisa mengetahui apakah bank tersebut berada di kondisi yang baik atau tidak. Jika semakin rendah NPL maka semakin rendah pula tingkat kredit bermasalah yang terjadi dan menandakan bahwa bank tersebut dalam kondisi yang baik, hal ini didasari oleh peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 telah menetapkan nilai standar maksimal tingkat NPL secara netto sebesar 5%. Dengan mengetahui tingkat NPL yang ada maka masyarakat bisa menentukan apakah bank tersebut bisa dipercayai atau tidak dan Bank Central (Bank Indonesia) dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi bank tersebut.

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Menurut Dahlan Siamat (1993:36) dalam (Sukarno dan Syaichu, 2006) dan dikutip kembali oleh (Kurniawan, 2015), risiko kredit (default risk) ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Menurut surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP.2001. Rumus *non performing loan* (NPL) adalah:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit yang bermasalah (kriteria 1,2,3)}}{\text{Total kredit yang di keluarkan}} \times 100\%$$

Bank Indonesia telah menentukan untuk *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 5%. Apabila Bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank-bank akan semakin menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Jayanti, 2013).

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap kredit yang disalurkanannya. PPAP untuk kredit berupa cadangan umum dan khusus yang besarnya tergantung dari kolektibilitasnya (Mada, 2015).

TABEL 4.3
PPAP Minimum Yang Wajib Dibentuk Berdasarkan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit	Minimum PPAP
Lancar	1% X kredit kualitas lancar
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	5% X (kredit kualitas DPK – nilai agunan)
Kurang Lancar (KL)	15% X (kredit kualitas KL – nilai agunan)
Diragukan (D)	50% X (kredit kualitas D – nilai agunan)
Macet (M)	100% X (kredit kualitas M – nilai agunan)

Sumber : PBI No. 8/2/2006 di dalam Romo (2015)

TABEL 4.4
Hasil Penilaian Faktor NPL

Hasil Penilaian Faktor NPL Predikat	NPL
Sehat	0% - 10,53%
Cukup Sehat	>10,35% - =12,60%
Kurang Sehat	>112,6% - =14,85%
Tidak Sehat	>14,8%

Sumber : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR didalam Romo (2015)

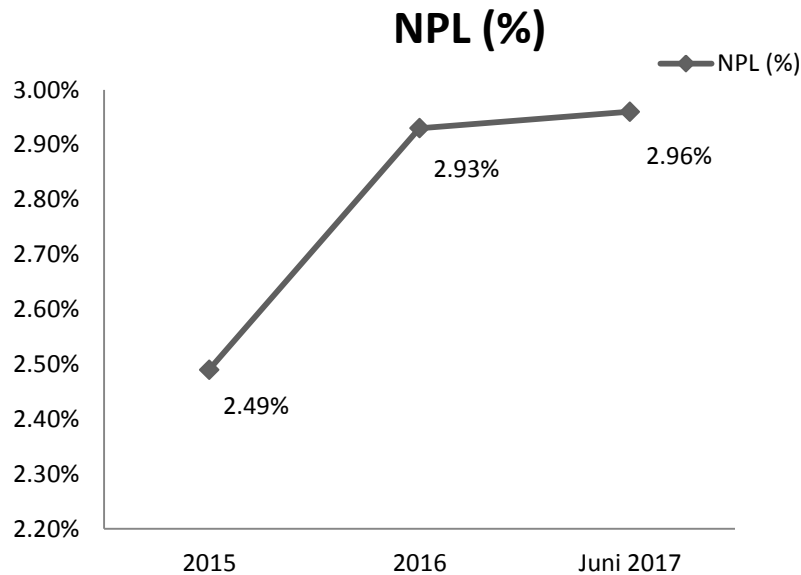
Bank Indonesia telah menentukan rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 5%. Untuk mengetahui penilaian kesehatan NPL dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR ditetapkan dalam table 4.4 diatas (Mada, 2015).

TABEL 4.5
Rasio NPL Pada Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	Juni 2017
Tingkat NPL (%)	2,49%	2,93%	2,96%

Sumber: OJK- Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2017

GAMBAR 4.1
Rasio NPL Pada Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)



Berdasarkan gambar diatas dapat menjelaskan bahwa rasio NPL dari Tahun 2015 hingga bulan Juni 2015 terus mengalami peningkatan. Berarti dalam hal ini menunjukkan kualitas kredit pada bank konvensional terus mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya rasio NPL dari Tahun 2015 hingga Juni 2017.

Pada Tahun 2015 rasio tingkat NPL sebesar 2,49% dan pada Tahun 2016 meningkat sebesar 0,44% menjadi 2,93% kemudian pada Juni 2017 meningkat kembali sebesar 0,03% menjadi 2,96%. Peningkatan yang besar terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 0,44%. Dalam hal ini tingkat resiko kredit pada bank konvensional masih berada pada tingkat aman atau sehat, karena rasio NPL tersebut masih berada di bawah batas yang telah di tentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.

C. Gambaran Umum Variabel Independen.

1. Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit tersebut merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dan dana pihak ketiga itu berupa giro, deposito berjangka (bukan deposito antar bank), tabungan, dan lain lainnya. Sehingga semakin tinggi LDR maka bank tersebut akan mendapatkan laba yang semakin meningkat, namun dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan baik dan jumlah kredit macetnya kecil.

Menurut (Mada, 2015) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

Rumus menghitung LDR:

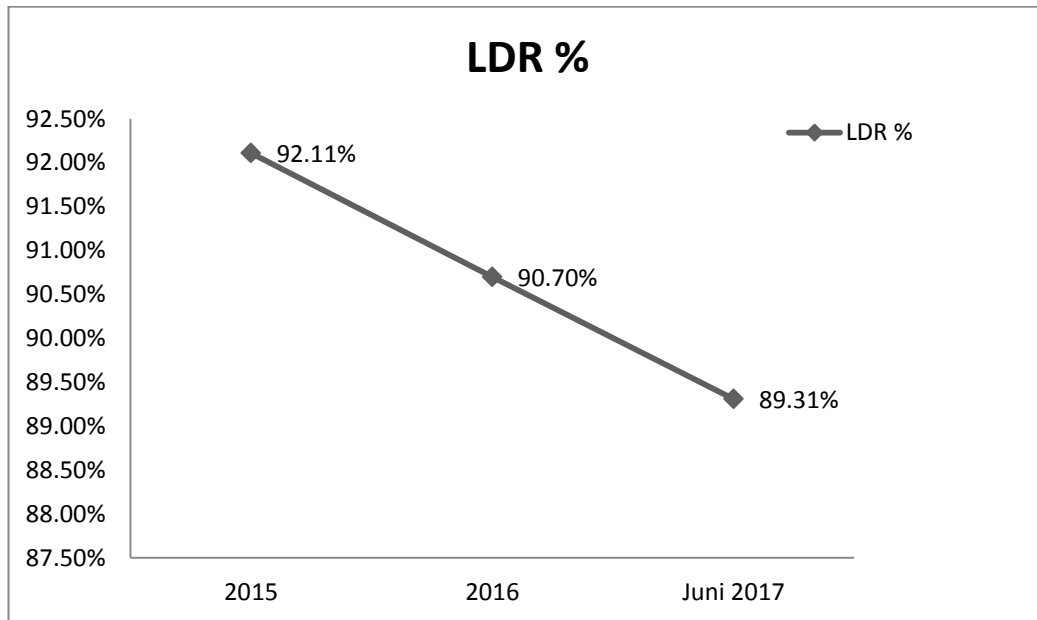
$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

TABEL 4.6
Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	Juni 2017
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	92,11%	90,70%	89,31%

Sumber: OJK- Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2017

GAMBAR 4.2
Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat LDR dari Tahun 2015 hingga Juni 2017 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank konvensional untuk menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat semakin menurun. Sehingga dapat menyebabkan tingkat NPL semakin meningkat dan berdampak buruk bagi bank konvensional.

Pada Tahun 2015 tingkat LDR pada bank konvensional sebesar 92,11% dan mengalami penurunan sebesar 1,41 % pada Tahun 2016 menjadi 90,70%, kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 1,39% pada Juni 2017 yang menjadi 89,31%. Penurunan terbesar terjadi pada Tahun 2015 hingga Tahun 2016 yaitu sebesar 1,41%. Hal ini harus

diperhatikan kembali oleh pihak bank konvensional agar meningkatkan kembali tingkat LDR tersebut agar dapat menjaga kesehatan bank.

2. Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kecukupan modal suatu bank yang berfungsi untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia jasa kredit. Semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh bank maka semakin baik pula kemampuan bank itu dalam menanggung risiko apabila ada kredit yang berisiko. Menurut (Andreani dan Erick, 2016) jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Rumus menghitung CAR:

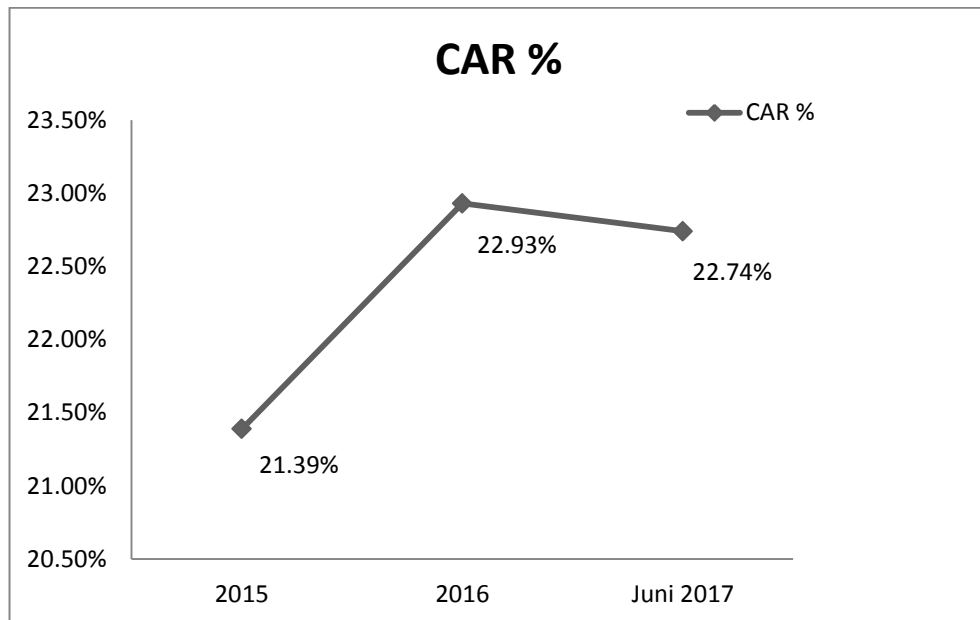
$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

TABEL 4.7
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	Juni 2017
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	21,39%	22,93%	22,74%

Sumber: OJK- Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2017

GAMBAR 4.3
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada Bank Konvensional
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)



Pada gambar diatas dapat dilihat tingkat CAR pada bank konvensional mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank konvensional dalam hal kecukupan modal yang berfungsi untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia jasa kredit masih sangat baik. Semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh bank maka semakin baik pula kemampuan bank itu dalam menanggung risiko apabila ada kredit yang berisiko.

Pada Tahun 2015 tingkat CAR pada bank konvensional sebesar 21,39% kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,54% pada Tahun 2016 menjadi 22,93%. Namun pada Tahun 2016 hingga Juni 2017 tingkat CAR mengalami penurunan sebesar 0,46% yaitu menjadi 22,47%.

3. *Gross Domestic Product (GDP)*.

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai output yang diproduksi oleh warga yang bermukim di suatu negara baik warga negara tersebut maupun warga negara asing dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mankiw (2007) didalam (Yulian, 2015) *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili pada negara tersebut, baik warga negara maupun warga negara asing.

Terdapat dua jenis *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebagai berikut (Mankiw, 2007 didalam (Yulian, 2015):

1. *Nominal GDP* (GDP Nominal), merupakan GDP yang memperhitungkan nilai barang dan jasa berdasarkan harga berlaku.
2. *Real GDP* (GDP rill), merupakan GDP yang memperhitungkan nilai barang dan jasa berdasarkan pada harga konstan

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari presentase pertambahan GDP rill yang berlaku pada periode ke periode selanjutnya (Sukino, 2010 didalam Yesica, 2015). Penilaian pertumbuhan ekonomi dilakukan menggunakan perhitungan GDP rill.

Berikut rumus pertumbuhan GDP:

$$\text{Pertumbuhan GDP} = \frac{\text{GDP rill}_m - \text{GDP rill}_{m-1}}{\text{GDP rill}_{m-1}}$$

Keterangan:

GDP rill_m = Nilai GDP periode m

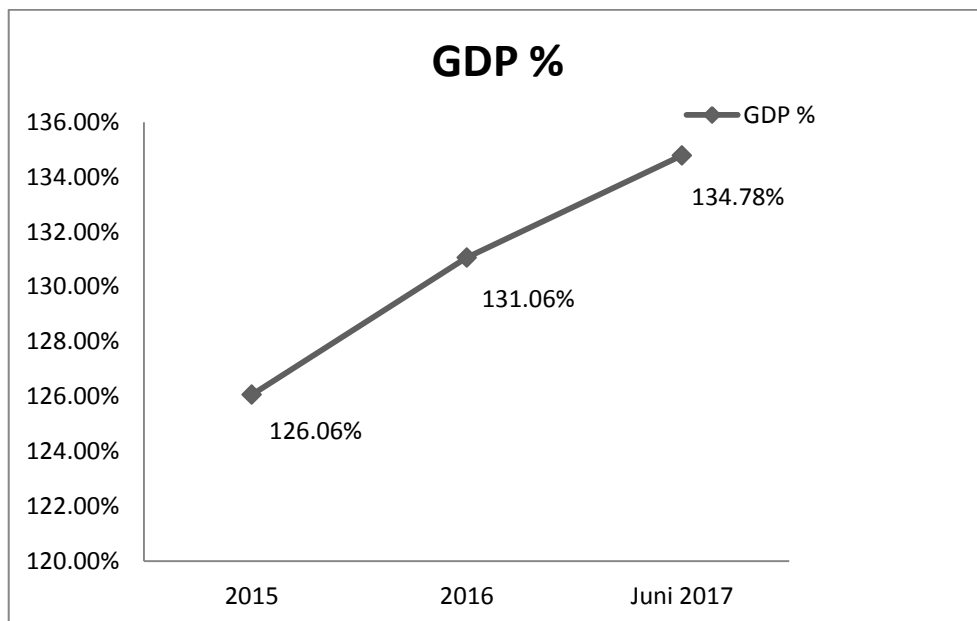
GDP rill_{m-1} = Nilai GDP rill periode sebelumnya

TABEL 4.8
Pertumbuhan GDP Di Indonesia
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	Juni 2017
GDP	126,06%	131,15%	134,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 4.4
Pertumbuhan Tingkat GDP Di Indonesia
Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan GDP di Indonesia dalam Periode Januari 2015 hingga Juni 2017 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2015 pertumbuhan GDP berada pada tingkat 126,06% kemudian di Tahun 2016 tingkat GDP mengalami peningkatan sebesar 5% dari Tahun 2015 yaitu menjadi 131,06%. Kemudian pada bulan Juni 2017 tingkat GDP meningkat kembali sebesar 3,72% dari Tahun 2016 yaitu menjadi 134,78%. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP di Indonesia sangatlah tinggi dari tahun ke tahun

4. BI Rate.

Bank Indonesia di dalam websitenya menjelaskan *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Bank Indonesia juga memaparkan *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*Liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh

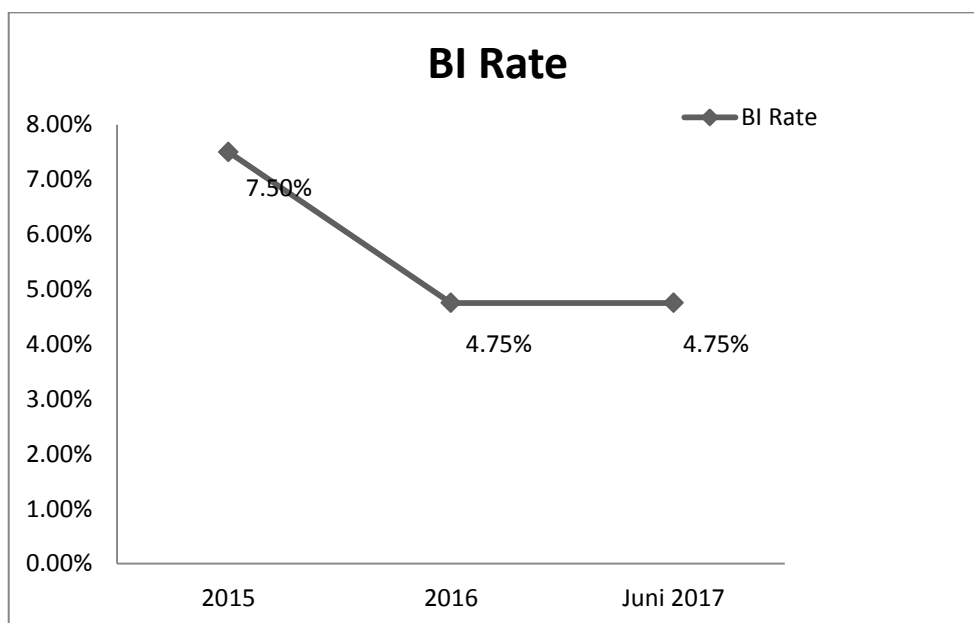
perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

TABEL 4.9
Tingkat BI Rate Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	Juni 2017
BI Rate	7,50%	4,75%	4,75%

Sumber: Bank Indonesia

GAMBAR 4.5
Tingkat BI Rate Periode Tahun 2015 – Juni 2017 (%)



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat BI Rate sudah mulai stabil, Karen pada tanggal 19 Agustus 2016 kemarin Bank Indonesia menerapkan kebijakan tingkat suku bunga baru yaitu BI 7-Day Repo Rate.